

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja dan menata kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat yang nantinya akan mewujudkan kesejahteraan penduduk. Fakta yang terjadi adalah beberapa negara berkembang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun gagal memperbaiki taraf hidup (kesejahteraan) masyarakatnya (Sain).

Paradigma pembangunan yang sedang berkembang saat ini adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan pembangunan manusia yang dilihat dari tingkat kualitas hidup manusia di tiap negara. Salah satu tolak ukur yang digunakan untuk melihat kualitas hidup manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diukur melalui kualitas tingkat pendidikan, kesehatan dan ekonomi (daya beli). Melalui peningkatan ketiga indikator tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup manusia. Hal ini dikarenakan adanya heterogenitas individu, disparitas geografi serta kondisi sosial masyarakat yang beragam sehingga menyebabkan tingkat pendapatan tidak lagi menjadi tolak ukur utama dalam menghitung tingkat keberhasilan pembangunan (Mirza, 2012).

Pembangunan diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi merupakan keadaan dimana ekonomi dalam suatu negara menjalankan suatu proses untuk mencapai peningkatan pendapatan negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi telah memperkuat integrasi dan solidaritas sosial, serta memperluas kemampuan dan akses orang terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, tempat tinggal dan perlindungan sosial (Bappenas).

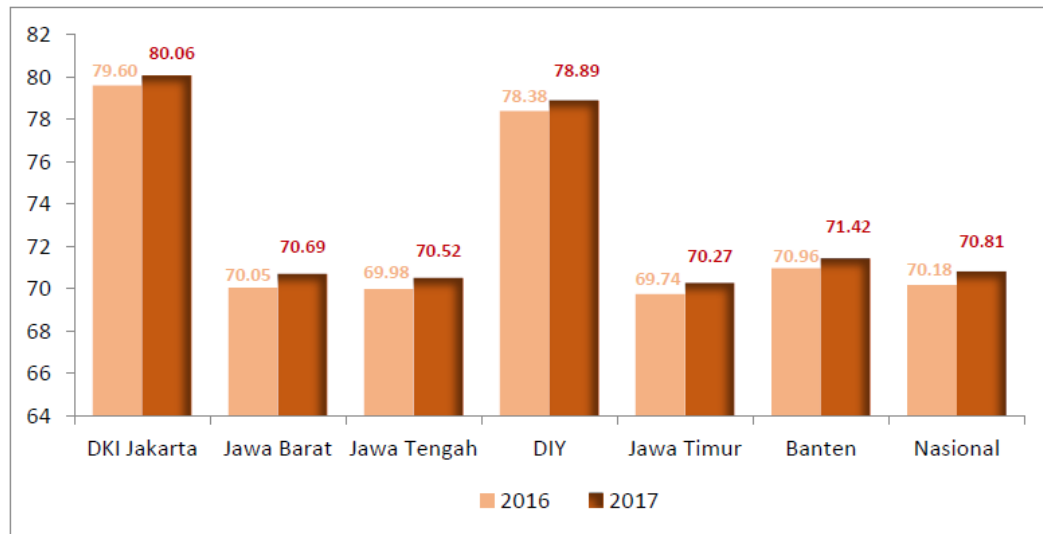
Badan Pusat Statistik (BPS) mengaplikasikan penghitungan IPM tersebut untuk melihat kemajuan pembangunan manusia di Indonesia baik pada level provinsi maupun level Kabupaten/Kota. BPS melakukan beberapa penyesuaian pada penghitungan IPM, yaitu pada komponen pendidikan dan ekonomi. Pada komponen pendidikan, BPS menggunakan MYS bukan Angka Partisipasi Sekolah (APS) karena APS merupakan indikator input, sementara MYS merupakan indikator output yang lebih mampu menggambarkan pencapaian di bidang pendidikan. Kemudian pada komponen ekonomi, BPS menggunakan PPP dengan pendekatan pengeluaran per kapita per tahun disesuaikan karena lebih mampu menggambarkan daya beli masyarakat dibandingkan dengan *Gross Domestic Product* (GDP) (Badan Pusat Statistik, 2017).

Pada tahun 2014 Badan Pusat Statistik (BPS) mengubah indikator komponen perhitungan IPM di Indonesia. Indikatornya antara lain angka melek huruf pada metode lama diganti dengan angka harapan lama sekolah dan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per

kapita. Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik. Sedangkan PNB menggantikan PDB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah (Badan Pusat Statistik, 2017).

Kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat terwujud apabila pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat akan menciptakan lapangan kerja sehingga dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak pada tingkat upah yang layak. Fakta yang ditemui adalah IPM secara nasional maupun provinsi masih rendah, yaitu masih pada kategori *Medium Human development*. Relatif rendahnya capaian IPM tersebut berarti telah terjadi masalah dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi (Sulistiawati, 2012).

Pada tahun 2017, IPM Jawa Tengah sebesar 70.52 masih berada di bawah level nasional yang besarnya 70,81. Dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa, IPM Jawa Tengah hanya lebih unggul dibandingkan Jawa Timur yang pada tahun 2017 memiliki IPM 70,27. IPM tertinggi di Pulau Jawa masih ditempati oleh DKI Jakarta dengan nilai IPM sebesar 80,06. Pada tahun ini status IPM DKI Jakarta berubah dari “tinggi” menjadi “sangat tinggi”. Posisi selanjutnya adalah DI Yogyakarta dengan IPM sebesar 78,89, disusul oleh Banten dengan IPM sebesar 71,42, Jawa Barat dengan IPM sebesar 70,69, dan kemudian Jawa Tengah di posisi kelima.



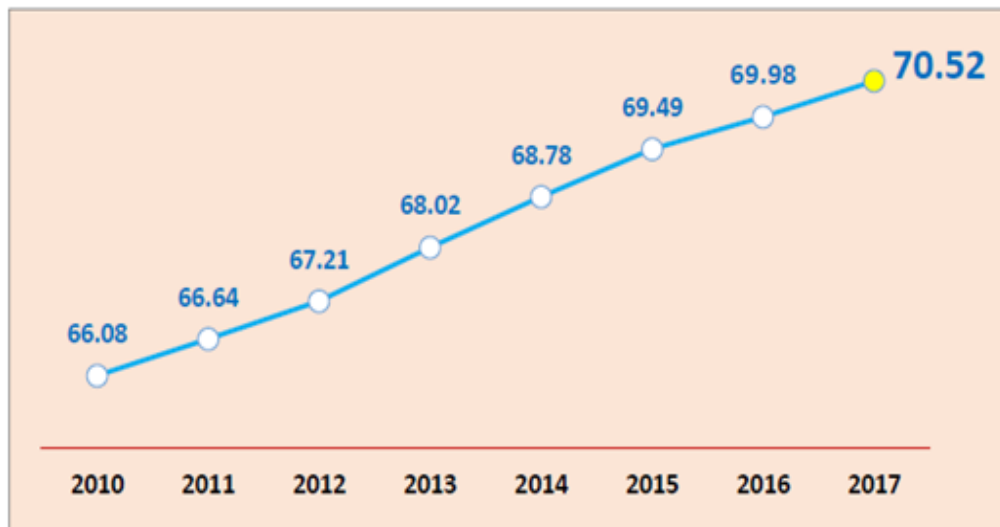
Sumber : BPS Jawa Tengah

Gambar 1.1

Indeks Pembangunan Manusia provinsi-provinsi di Pulau Jawa tahun 2016-2017

Meskipun secara capaian angka IPM Jawa Tengah 2017 umumnya di bawah provinsi lain di Pulau Jawa, namun memiliki pertumbuhan yang relatif tinggi yakni sebesar 0,77 persen. Pertumbuhan ini merupakan yang tertinggi kedua setelah Jawa Barat yang tumbuh sebesar 0,91 persen. Pertumbuhan IPM Jawa Tengah pada tahun ini merupakan yang terbesar selama 7 tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan bahwa Jawa Tengah telah berupaya keras untuk dapat meningkatkan pembangunan manusia di dalamnya (Badan Pusat Statistik, 2017).

**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Tengah,
Tahun 2010-2017**



Sumber : BPS Jawa Tengah

Gambar 1.2

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2017

Pada tahun 2017, pencapaian pembangunan manusia di tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah cukup bervariasi. IPM pada level Kabupaten/Kota berkisar antara 64,86 (Kabupaten Brebes) hingga 82,01 (Kota Semarang). Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir berkisar antara 68,61 tahun (Kabupaten Brebes) hingga 77,49 tahun (Kabupaten Sukoharjo). Sementara pada dimensi pengetahuan, Harapan Lama Sekolah (HLS) berkisar antara 11,41 tahun (Kabupaten Banjarnegara) hingga 15,20 tahun (Kota Semarang), serta Rata-rata Lama Sekolah berkisar antara 6,18 tahun (Kabupaten Brebes) hingga 10,50 tahun (Kota Semarang). Sedangkan, pengeluaran per kapita disesuaikan di tingkat Kabupaten/Kota

berkisar antara 7,79 juta rupiah per tahun (Kabupaten Pemalang) hingga 14,92 juta rupiah per tahun (Kota Salatiga). Selama 2016-2017, terdapat pergeseran jumlah Kabupaten/Kota yang berstatus “tinggi” yang semula 15 daerah menjadi 16 daerah. Kabupaten yang mengalami perubahan status dari “sedang” ke “tinggi” adalah Kabupaten Pati. Kemajuan pembangunan manusia pada tahun 2017, selain dapat dilihat dari pergeseran status juga terlihat dari rata-rata IPM per status. Rata-rata IPM berstatus “sedang” mengalami peningkatan dari 67,04 di tahun 2016 menjadi 67,53 di tahun 2017. Demikian juga rata-rata IPM berstatus “tinggi” meningkat sebesar 0,35 poin dari 72,57 di tahun 2016 menjadi 72,92 di tahun 2017. Rata-rata IPM berstatus “sangat tinggi” mengalami peningkatan dari 81,03 di tahun 2016 menjadi 81,51 di tahun 2017. Tiga wilayah yang memiliki status IPM “sangat tinggi” masih sama seperti periode sebelumnya, yakni Kota Salatiga, Kota Surakarta, dan Kota Semarang (BPS,2017).

Wilayah Eks-Karesidenan Pekalongan merupakan wilayah yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah bagian utara. Wilayah ini terdiri dari 7 wilayah yang terdiri dari lima kabupaten dan dua kota yaitu Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Pekalongan dan Kota Tegal.

Tabel 1.1
10 Kabupaten/Kota dengan IPM Terendah Di Jawa Tengah

No	Kabupaten/Kota	Tahun		
		2015	2016	2017
1	Kab. Temanggung	67,07	67,6	68,34
2	Kab. Kebumen	67,03	67,48	68,29
3	Kab. Purbalingga	66,87	67,41	67,72
4	Kab. Blora	66,22	66,61	67,52
5	Kab. Batang	65,7	66,38	67,35
6	Kab. Wonosobo	65,46	66,19	66,89
7	Kab. Tegal	65,04	65,84	66,44
8	Kab. Banjarnegara	64,73	65,52	65,86
9	Kab. Pemalang	63,7	64,17	65,04
10	Kab. Brebes	63,18	63,98	64,86

Sumber : BPS Jawa Tengah

Peringkat IPM di Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Pekalongan bervariasi, terdapat beberapa Kabupaten di Eks-Karesidenan Pekalongan yang memasuki peringkat dengan sepuluh nilai IPM terendah di Jawa Tengah yaitu Kabupaten Batang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Brebes. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Batang pada tahun 2017 menempati urutan 6 terbawah atau urutan 30 dengan IPM sebesar 67,35%. IPM Kabupaten Batang terus meningkat selama 2010-2016, meskipun capaiannya masih di bawah angka nasional dan provinsi. Pada 2016, IPM Batang pertumbuhannya paling tinggi di Jateng melebihi daerah lain, yaitu sebesar 1,41%. Selanjutnya, pada posisi urutan 4 terbawah atau urutan 35 dengan IPM terendah pada tingkat provinsi Jawa Tengah di tempati oleh Kabupaten Tegal, pada tahun 2017 IPM Kabupaten Tegal sebesar 66,44%. Angka tersebut menunjukkan rendahnya tingkat pembangunan manusia di kabupaten tegal yang ditandai dengan banyaknya anak remaja usia 16-17 yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan pelayanan kesehatan

yang kurang maksimal. Sedangkan Kabupaten Pemalang pada tahun 2017 menempati urutan 2 terbawah atau urutan 34 dengan IPM terendah pada tingkat provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 65,04%. Angka tersebut menunjukkan peringkat Kabupaten Pemalang lebih baik dibandingkan Kabupaten Brebes, namun masih jauh dibawah kabupaten yang lainnya. Pada urutan terakhir ditempati oleh Kabupaten Brebes, Kabupaten Brebes menempati urutan 10 terbawah atau urutan 35 dengan IPM terendah pada tingkat Provinsi Jawa Tengah yaitu memiliki IPM sebesar 64,86%. Angka tersebut cukup memprihatinkan karena rendahnya tingkat kualitas pembangunan di Kabupaten Brebes. Hal ini disebabkan tingginya angka kemiskinan dan kurang tersedianya fasilitas pendidikan dan kesehatan.

Kota Pekalongan mempunyai upah minimum terbesar di Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Pekalongan pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.623.750,00, diikuti oleh Kabupaten Batang dengan upah minimum sebesar Rp. 1.603.000,00, Kabupaten Pekalongan dengan upah minimum sebesar Rp. 1.583.697,00. Selanjutnya, Kota Tegal dan Kabupaten Tegal mempunyai upah minimum sebesar Rp. 1.499.500,00 dan Rp.1.487.000,00. Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Brebes merupakan kabupaten dengan upah minimum terkecil dari Kabupaten/Kota di Eks-Karesidenan Pekalongan. Kabupaten Pemalang menempati urutan 22 dan Kabupaten Brebes menempati urutan 32 dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Meskipun upah minimum Kabupaten/Kota di Eks-Karesidenan Pekalongan pada tahun 2010–2017 cenderung meningkat dari tahun ke tahun, namun peningkatan upah minimum di

Kabupaten/Kota di Eks-Karesidenan Pekalongan masih sangat kecil dibanding kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Tengah.

Penelitian yang dilakukan oleh Chalid dan Yusuf (2014) menunjukkan bahwa dari hasil analisis diketahui upah minimum Kabupaten/Kota berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Masalah tenaga kerja tidak terlepas dari upah minimum regional (UMR). Upah minimum ini merupakan salah satu pertimbangan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya disuatu daerah terutama investor yang ingin mendirikan pabrik atau industry yang banyak menyerap tenaga kerja. Semakin tinggi upah minimum regional suatu daerah menunjukkan semakin tinggi tingkat ekonominya.

Selain dari sisi upah minimum untuk meningkatkan IPM, kondisi sosial ekonomi masyarakat juga dapat mempengaruhi IPM adalah tingkat pengangguran terbuka. Pembangunan sektor ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya pembangunan sumber daya manusia. Pengangguran menyebabkan tingkat kemakmuran masyarakat tidak maksimal sedangkan tujuan akhir dari pembangunan yaitu untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Baeti (2013) menyatakan bahwa pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Jika tingkat pengangguran di suatu daerah tinggi maka akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi. Pendapatan masyarakat berkurang sehingga daya beli masyarakat menurun, pendidikan dan kesehatan

yang merupakan kebutuhan dasar untuk meningkatkan kualitas manusia juga tidak dapat tercukupi. Mereka juga tidak dapat menikmati kehidupan yang layak, sehingga kesejahteraan mereka tidak terpenuhi (Baeti, 2013).

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah. Secara umum, periode 2011–2017 tingkat kemiskinan di Jawa Tengah mengalami penurunan kecuali pada September 2011 dan Maret 2014. Pada periode tahun 2011–2017 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan dari 5,14 juta orang pada Maret 2011 menjadi 4,45 juta orang pada Maret 2017. Secara relatif juga terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari 15,72 persen pada Maret 2011 menjadi 13,01 persen pada Maret 2017. Angka kemiskinan di Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Pekalongan pada tahun 2010-2017 cenderung mengalami fluktuatif kecuali kemiskinan di Kota Pekalongan dan Kota Tegal yang mempunyai tren negatif dan cenderung selalu turun dari tahun ke tahun. Sedangkan Kabupaten Brebes adalah kabupaten dengan jumlah penduduk miskin terbanyak yaitu dengan jumlah penduduk miskin sebesar 343.50 ribu orang pada tahun 2017 (Berita Resmi Statistik Kemiskinan, 2017).

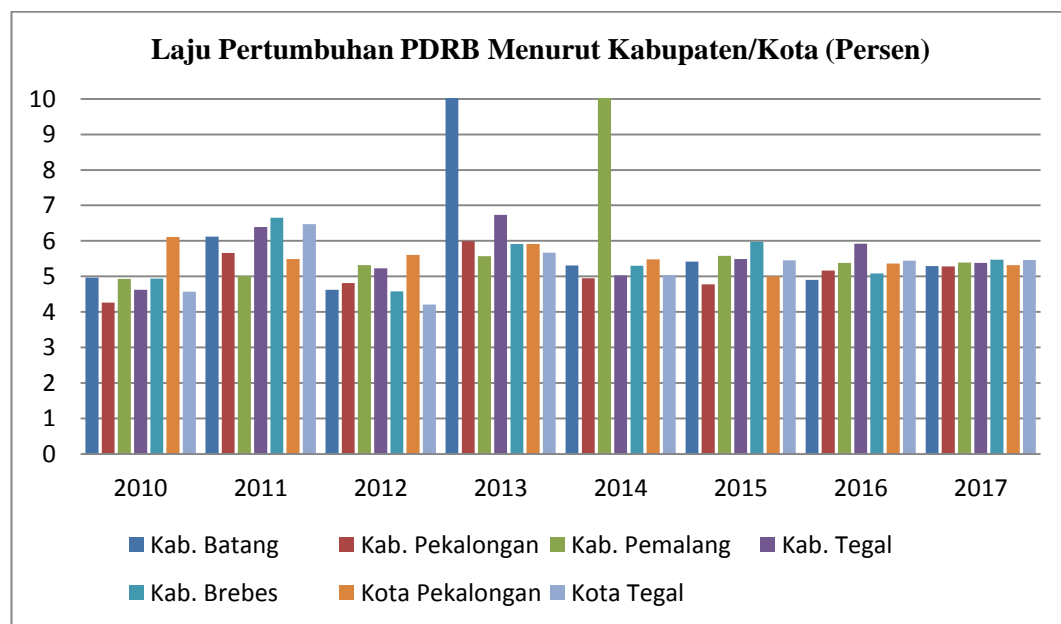
Dengan tingginya tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dan beberapa di Kabupaten Eks-Karesidenan Pekalongan wilayah tersebut masih terjadi peningkatan IPM bahkan diantaranya cukup besar. Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang menjadi penghambat proses pembangunan. Kemiskinan memang merupakan salah satu masalah yang

kompleks yang dihadapi oleh berbagai negara, termasuk di berbagai daerah di Indonesia (Prawoto, 2009).

Penelitian yang dilakukan oleh Etik dkk. (2017) menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Peningkatan jumlah dan persentase penduduk miskin terjadi dikarenakan harga barang-barang kebutuhan pokok yang melonjak drastis karena adanya tingkat inflasi yang tinggi. Akibatnya penduduk yang tergolong tidak miskin namun penghasilannya berada di sekitar garis kemiskinan banyak yang bergeser posisinya menjadi miskin. Perkembangan tingkat kemiskinan di suatu daerah menggambarkan perbaikan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Semakin tinggi tingkat kemiskinan maka menandakan semakin buruknya keadaan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional, pembangunan ekonomi Provinsi Jawa Tengah juga berperan penting terhadap sukses tidaknya pembangunan ekonomi nasional secara keseluruhan. Pembangunan daerah Jawa Tengah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan permasalahan pembangunan di daerah. Pertumbuhan ekonomi di wilayah yang mempunyai areal seluas 34.200 itu bisa dikatakan dalam kondisi stabil, namun apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi provinsi lain di Pulau Jawa maupun di Indonesia, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah masih tergolong rendah.

Grafik 1.3 memperlihatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota yang ada di Eks-Karesidenan Pekalongan berdasarkan dari persentase laju pertumbuhan PDRB atas harga konstan 2010 menurut Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Pekalongan tahun 2010-2017.



Sumber : BPS Jawa Tengah

Gambar 1.3
Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan
Pekalongan

Dari grafik diatas dapat dijelaskan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Pekalongan dari tahun 2010–2017 mengalami fluktuatif dan menunjukkan adanya perbedaan laju pertumbuhan ekonomi di setiap kabupaten. Dari 7 wilayah administrasi yang berada di Eks-Karesidenan pekalongan pada tahun 2017 Kabupaten Brebes memiliki laju pertumbuhan ekonomi tertinggi dari Kabupaten/Kota di Karesidenan Pekalongan yaitu sebesar

5,47%, sedangkan Kabupaten Pekalongan memiliki laju pertumbuhan ekonomi terendah dari Kabupaten/Kota di Karesidenan Pekalongan yaitu sebesar 5,28%.

Penelitian yang dilakukan oleh Wardana (2016) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan peningkatan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat, sehingga semakin banyak barang dan jasa yang diproduksi maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusianya.

Alasan peneliti memilih kabupaten/kota di Eks-Karesidenan Pekalongan sebagai objek penelitian karena Eks-Karesidenan Pekalongan masuk dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah yang merupakan provinsi dengan IPM selalu terendah di pulau Jawa dan menempati 10 besar IPM terendah di Jawa Tengah. Selain itu, Eks-Karesidenan Pekalongan merupakan Kabupaten/Kota dengan tingkat kemiskinan yang cukup besar di Pulau Jawa. Hal serupa juga terlihat untuk untuk Kabupaten/Kota di Eks-Karesidenan Pekalongan. Ada beberapa kabupaten dengan jumlah penduduk miskin yang banyak dan juga Kabupaten Brebes yang merupakan wilayah dengan jumlah penduduk miskin paling banyak. Beberapa Kabupaten/Kota di Eks-Karesidenan Pekalongan merupakan Kabupaten/Kota dengan tingkat kemiskinan yang tinggi sekaligus merupakan wilayah dengan tingkat upah minimum terendah serta laju pertumbuhan ekonomi yang cenderung meningkat dari tahun ketahun tapi tetap menunjukkan peningkatan indeks pembangunan manusia setiap tahunnya.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Determinan Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di Eks-Karesidenan Pekalongan**”.

1.2 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini peneliti membatasi variabel-variabel yang ditelitinya sebagai berikut :

1. Untuk variabel dependen (Y) adalah Indeks Pembangunan Manusia
2. Untuk variabel independennya adalah Upah Minimum Kabupaten/Kota (X1) , Tingkat Pengangguran Terbuka (X2), Jumlah Penduduk Miskin (X3), Pertumbuhan Ekonomi (X4).

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan pokok yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Eks-Karesidenan Pekalongan
2. Seberapa besar pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Eks-Karesidenan Pekalongan
3. Seberapa besar pengaruh Jumlah Penduduk Miskin terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Eks Karesidenan Pekalongan
4. Pengaruh Seberapa besar Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Eks-Karesidenan Pekalongan

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Eks-Karesidenan Pekalongan
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Eks-Karesidenan Pekalongan
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Jumlah Penduduk Miskin terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Eks-Karesidenan Pekalongan
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Eks-Karesidenan Pekalongan

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu sebagai berikut :

- a) Menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman mengenai penelitian Analisis Determinan Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Eks-Karesidenan Pekalongan.
- b) Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terutama mengenai Analisis Determinan Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Eks-Karesidenan Pekalongan.

- c) Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan untuk menentukan kebijakan, terutama pada bidang pemberdayaan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat

